

Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur



POLICY BRIEF

Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur

Ringkasan Eksekutif

Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada sektor kesehatan, hari demi hari jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah kematian akibat Covid-19 terus terjadi. Eskalasi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang tidak hanya terjadi pada aras nasional menimbulkan dampak pada skala provinsi. Provinsi Jawa Timur sendiri, dampak Covid-19 menimbulkan 2 isu krusial, yakni: 1) Belum meratanya distribusi vaksin antar kota/kabupaten di Jawa Timur. Padahal apabila melihat data yang ada, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia, serta 2) Belum adanya transparansi dana bansos dan data yang jelas untuk penerima bansos yang akurat sehingga mengakibatkan belum terserapnya anggaran bansos secara optimal dan menimbulkan celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan terhadap 2 isu krusial di Jawa Timur tersebut serta sebagai wujud pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat d yakni “terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, aliansi kami yang terdiri dari Lapor Covid-19, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya melakukan pembuatan Policy Brief yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur”.

Harapannya, masukan di dalam Policy Brief ini dapat memberikan dampak positif berupa rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar nantinya dapat mengatasi 2 isu krusial tersebut yakni ketimpangan penyaluran vaksin antar kabupaten/kota dan transparansi dana bansos, akurasi data bansos, serta problema korupsi bantuan sosial di Jawa Timur.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan Pandemi, Ketimpangan Vaksinasi, Korupsi Bansos, Pemprov Jatim*

Pendahuluan

Hak atas kesehatan dan jaminan sosial merupakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Atas dasar ini, pada masa pandemi, pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebut dengan melakukan langkah khusus untuk mempercepat gerak pencegahan, perawatan dan pengawasan kepada warga negara tanpa diferensiasi subjektif seperti yang termaktub pada amanat konstitusi. Pandemi yang menyerang sektor kesehatan mengharuskan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan extra baik dari segi kesehatan maupun jaminan sosial. Untuk tetap bertahan di masa pandemi masyarakat diharuskan untuk mendapatkan vaksinasi agar tidak terjangkit virus covid-19. Selain itu dampak pandemi yang merambah ke sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehingga memerlukan bantuan sosial dari pemerintah.

Vaksinasi adalah salah satu intervensi penting dalam penanganan pandemi.. Namun, realitanya angka vaksinasi masih rendah dan jauh dari target. Salah satu wilayah yang belum mencapai target vaksinasi adalah Provinsi Jawa Timur. Pada sisi yang lain, Jawa Timur adalah wilayah dengan kuota vaksin terbanyak. Namun, belum dimbangi dengan tingginya angka vaksinasi. Rendahnya angka vaksinasi disebabkan oleh dua persoalan mendasar, yakni persoalan horizontal yang terjadi di masyarakat perihal kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang vaksinasi, dan persoalan vertikal seperti ketidakmerataan dan kesenjangan distribusi vaksin dan sulitnya akses mendapatkan vaksin untuk masyarakat di luar wilayah prioritas. Persoalan horizontal, sudah pasti dapat segera ditangani dengan penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi, akan tetapi upaya percepatan vaksinasi akan semakin kacau jika distribusi dan aksesibilitas tidak segera diperbaiki.

Selain persoalan vaksinasi, Provinsi Jawa Timur juga memiliki persoalan tentang bantuan sosial. Provinsi Jawa Timur memiliki penduduk kurang lebih 40 juta jiwa yang sebagian besarnya mengalami dampak penurunan ekonomi sebagai imbas dari pandemi. Masyarakat yang mengalami penurunan sangat membutuhkan bantuan pemerintah berupa bantuan sosial yang telah diprogramkan untuk menangani pandemi. Namun, dalam penyaluran dana bantuan sosial tidak luput dari permasalahan meliputi tumpang tindih data penerima bantuan sosial sampai korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pendamping PKH. Berbagai permasalahan dalam penanganan pandemi harus segera diatasi dengan strategi dan kebijakan baru yang lebih tepat dan terarah agar pandemi segera teratasi.

Pembahasan

Problema Korupsi Bansos Selama Periodisasi Pandemi Provinsi Jatim

Jaminan Perlindungan Sosial di Jawa Timur yang diberikan kepada warga terdampak Pandemi Covid-19 memiliki banyak permasalahan. Fakta ini dibuktikan dengan adanya 1.032 laporan dengan kata kunci “bansos” yang masuk di kanal aduan CETTAR milik Pemprov Jawa Timur per 5 September 2021. Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan ini muncul akibat minimnya pengawasan dan transparansi dari pengelola bantuan sosial yang juga menyebabkan penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu.

Salah satu laporan yang masuk di kanal CETTAR menyatakan bahwa mekanisme penentuan dan transparansi data penerima bansos masih abu-abu:

“Selamat siang, mau tanya sebenarnya pembagian bansos covid-19 itu sistem nya dimana? Masak di kampung saya 1 KK ada yg dapat bantuan suami & istrinya dalam 1 KK bantuan beras 10kg, dapat bantuan BST juga suaminya. Malah ada juga yg dapat BST, PKH, Beras 10kg bulan ini. Malah yg seharusnya dapat sekarang tidak dapat sekali baik PKH, BST & beras 10kg. Kayaknya yg dapat rata2 dari kalangan RT & RW aja. Tolong diperbaiki sistem nya klo bisa jangan hanya lewat RT & RW pendataannya karena banyak gak adil nya yg didahulukan pasti dari kalangan nya kayak saudara & temannya dulu. Jadi percuma mengadu ke RT, RW ataupun ke pihak kelurahan. Katanya 1 KK atau 1 orang hanya bisa mendapatkan 1 jenis BANSOS aja dari PKH, BST atau sembako tapi kenyataan dilapangan berbeda. Mohon keadilannya”

(20 Agustus 2021)

Selain itu, LaporCovid-19 juga menerima aduan keluhan bantuan sosial oleh warga Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar melaporkan perihal pendataan yang masih kacau sehingga banyak dari mereka yang seharusnya menerima namun tidak terdata:

“Assalamualaikum, semua warga di RT saya dapat BANSOS..knp saya kok tidak dapat mulai BANSOS awal sampai detik ini.padahal saya juga terdampak pandemi..malah ada tetangga KAYA mlh dapat BANSOS terus mulai awal pandemi sampai sekarang..gmn proses pendataan pembagian BANSOS nya.”

(Kota Surabaya, 21 Agustus 2021)

“Saya dan jutaan warga lain bekerja di bidang catering wedding service yang sangat terdampak mulai awal pandemi, saya pribadi cman dapat bantuan 200 x 2 di awal2 pandemi, sampai sekarang belum dapat lagi, padahal masih blm

bisa kerja sama sekali,sempat normal sieh awal2 tahun 2021 sekitar 2-3 bulan, kemudian PPKM lagi sampai sekarang, EKONOMI SAYA SUDAH MORAT MARIT, istri sudah saya pulangkan ke orang tuanya kran saya sudah tidak sanggup kasih makan.. Kenapa pekerja informal tidak dapat bantuan subsidi gaji hnyak karena tidak terdaftar di BPJSTK, .teman saya gajinya jutaan di pabrik besar malah dapat transferan.”

(Kota Surabaya, 21 Agustus 2021)

“Saya adalah pedagang kaki lima yg terdampak ppkm , saya sudah berkali2 daftar program bantuan UMKM , tp sama sekali tidak ada tanggapan dan tdk pernah dapat apapun selama pandemi.”

(Kota Surabaya, 27 Agustus 2021)

Pendataan Bansos yang tidak transparan tersebut berpotensi menjadi celah untuk praktik korupsi. Transparency International Indonesia (TII) mengidentifikasi bahwa proses pendataan yang akurat menjadi salah satu cara untuk memantau penyaluran bantuan sosial agar terhindar dari segala bentuk penyelewengan, termasuk pemberian bantuan sosial kepada kelompok yang seharusnya tidak berhak mendapatkan.¹

Selanjutnya, kualitas bantuan sosial di beberapa daerah di Jawa Timur masih bermasalah. Kasus yang terjadi di Bangkalan setidaknya menjadi sebuah fakta yang mendukung kuat bahwa kualitas bantuan sembako harus diperbaiki. Bantuan yang berupa beras sebanyak 3000 paket untuk warga selama penerapan PPKM berkutu dan berwarna kuning.² Pemerintah memang sudah bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Namun, satu hal yang cukup penting adalah penelusuran apa yang menyebabkan bantuan sembako dengan jumlah yang besar bisa lepas dari pengawasan pihak berwenang. Kasus tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan terkait proses pengadaan maupun distribusi bansos yang juga mengarah pada penyelewengan pihak yang memiliki tanggung jawab di dalamnya.

Permasalahan lain yang muncul adalah penyerapan anggaran untuk bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum optimal. Sampai Agustus 2021, persentase penyerapan anggaran Bansos baru menyentuh angka 38% atau Rp 44,5 Miliar dari total Rp 123,7 Miliar. Jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat dalam laporan, baik itu di kanal CETTAR maupun yang diterima LaporCovid-19, maka hal ini menimbulkan sebuah kontradiksi. Pada satu sisi, banyak masyarakat yang mengeluhkan sama sekali belum pernah menerima bantuan dengan kondisi mereka yang cukup terdampak. Di sisi lain, anggaran yang tersedia dalam pagu masih melimpah ruah tetapi belum terserap secara optimal. Minimnya penyerapan anggaran untuk bantuan sosial ini kemudian menjadi pertanyaan masyarakat perihal ketidakefektifan dan potensi penyelewengan dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi.

¹ See Koalisi Masyarakat Sipil (2020). Panduan Pemantauan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) Dalam Penanganan Covid-19 Bagi Masyarakat Sipil. Available at: https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Modul-Pemantauan-Bansos_CS0.pdf

² See cnnindonesia.com (2021). DPRD Jatim Minta Polisi Usut Kasus Beras Bansos Berkutu. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806095116-32-677164/dprd-jatim-minta-polisi-usut-kasus-beras-bansos-berkutu>

Berbagai kecurigaan tersebut sejatinya bukan suatu hal yang tak berdasar. Sebuah kasus korupsi yang terjadi di Malang beberapa waktu lalu menjadi bukti aktual sekaligus faktual akan praktik penyelewengan yang dicurigai sebelumnya. Tersangka yang juga pendamping PKH membekali diri dengan Kartu Sembako para warga yang dia pegang, termasuk data penerima bansos fiktif dan tidak aktif.³ Pendataan yang tidak diperbaharui menjadi celah bagi tersangka untuk melakukan praktik korupsi. Selain itu, sebuah penelitian tentang motif korupsi, dijelaskan bahwa salah satu motif yang marak terkait praktik korupsi adalah faktor solidaritas.⁴ Fakta bahwa pelaku diajari melakukan praktik korupsi dari rekan sesama pendamping menjadi bukti konkret akan penelitian tersebut. Secara lebih lanjut, hal ini mengindikasikan bahwa ada rantai korupsi secara horizontal yang perlu untuk segera ditangani.

Kasus korupsi PKH di Malang ini sepatutnya menjadi sebuah alarm bagi pelaksanaan kebijakan bansos yang ada di Jawa Timur. Permasalahan yang sangat beragam selama prosesnya dari hulu menuju hilir memiliki satu pola kesamaan, yakni potensi penyelewengan yang semakin terbuka lebar. Berangkat dari berbagai analisis itulah, kebijakan bantuan sosial di Jawa Timur perlu dievaluasi secara lebih mendalam lagi untuk mempersempit celah penyelewengan. Hal ini penting terutama untuk menjaga keberlangsungan masyarakat terdampak pandemi yang menggantungkan hidupnya dari Bansos.

Jaminan Kesehatan dan Keadilan dalam Perlindungan Hak Masyarakat Provinsi Jatim di bawah Buaian Vaksinasi, Masih Adakah?

Hak atas kesehatan semestinya menjadi hal yang paling mendasar dan harus menjadi landasan dari setiap langkah maupun respon pemangku kebijakan dalam penanganan pandemi. Hal ini disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (DUHAM) Pasal 25 yang juga diperkuat dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang juga secara jelas menyatakan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak atas setiap orang dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam pencegahan, perawatan dan pengawasan penyakit tertentu dan penyakit lainnya.

Pemenuhan hak atas kesehatan juga dijamin oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemenuhan hak atas kesehatan juga termasuk soal pelayanan yang adil dan setara untuk memperoleh vaksin.

Pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat, menerapkan protokol kesehatan, menyelenggarakan 3T (testing, tracing, treatment), hingga program vaksinasi.

³ See Kompas.com (2021). Pendamping Bansos di Malang Jadi Tersangka Korupsi Senilai Rp 450 Juta. Available at: <https://www.kompas.tv/article/200152/pendamping-bansos-di-malang-jadi-tersangka-korupsi-senilai-rp-450-juta>

⁴ See Nadiatus Salama (2014). Motif dan Proses Psikologi Korupsi. Jurnal Psikologi. Vol. 4 No. 2, hal. 156.

Namun, program vaksinasi yang digalakkan pemerintah sebagai bagian dari intervensi penanganan pandemi, nyatanya memiliki berbagai persoalan. Selain stok vaksin yang terbatas, distribusi vaksin yang tidak merata juga berujung pada ketimpangan ketersediaan vaksin di daerah.

Selama ini, penyelenggaraan vaksinasi dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait dengan metode distribusi yang disesuaikan dengan jumlah permintaan dari penyelenggara vaksinasi. Dalam hal ini, pendistribusian vaksin akan sangat mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola cold chain dan kecepatan tatalaksana vaksinasi kepada sasaran yang telah ditentukan. Adapun penerimaan vaksin terhadap warga dan kelompok prioritas yang menjadi target sasaran juga turut andil dalam program vaksinasi secara keseluruhan. Provinsi Jawa Timur yang termasuk daerah dengan distribusi vaksin terbanyak di Indonesia, yang juga tak luput dari masalah dalam pemerataan dan target sasaran sehingga mengakibatkan ketimpangan perolehan vaksinasi dan kelompok rentan tidak diprioritaskan untuk memperoleh vaksinasi.

Per tanggal 22 Agustus 2021, Provinsi Jawa Timur mencatatkan penambahan kasus positif tertinggi dalam skala nasional dengan total penambahan sebesar 12.898 kasus.⁵ Hal ini turut memicu banyak spekulasi dan tanda tanya mengingat bahwa sejak pertama kali pendistribusian vaksin dilaksanakan di tahun 2021, Provinsi Jawa Timur merupakan penerima dosis vaksin tertinggi di Indonesia dengan akumulasi keseluruhan yang diterima sebanyak 77.760 dosis Sinovac.⁶ Masih dalam periode yang sama, yaitu di bulan Agustus 2021, pelaksanaan vaksinasi di Kota Surabaya telah mencapai 82% dari target sasaran provinsi. Sedangkan sebagian besar daerah lain justru masih kurang dari 50%. Artinya, ada ketimpangan dalam distribusi vaksin di berbagai titik wilayah Jawa Timur, dan sejumlah rasionalisasi yang menitikberatkan pada fokus prioritas distribusi vaksin terhadap wilayah yang dinilai memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi, termasuk diantaranya Kota Surabaya sebagai daerah ibukota sekaligus salah satu pusat mobilitas dan kegiatan perekonomian di Jawa Timur

Sampai dengan periode akhir bulan atau secara spesifiknya pada tanggal 8 September 2021, Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan vaksinasi dengan realisasi target pencapaian sebesar 10.973.098 atau 34.48% untuk dosis pertama dan sebanyak 6.106.141 atau 19.19% untuk dosis kedua. Secara keseluruhan, pencapaian ini masih sangat jauh dari target nasional yang ditetapkan sebagai standar kualifikasi atau kelayakan bagi negara Indonesia guna mengimplementasikan program pelaksanaan vaksinasi secara masif guna mencapai target Herd Immunity yang berpacu pada jumlah pencapaian pelaksanaan vaksinasi terhadap 208 juta penduduk Indonesia dari total populasi sebanyak

⁵ Lavinda. *Kasus Positif Covid-19 RI Tambah 12.898 Orang, Terbanyak dari Jatim*. 2021.

<https://katadata.co.id/lavinda/berita/6122329c46037/kasus-positif-covid-19-ri-tambah-12898-orang-terbanyak-dari-jatim>

⁶ Cindy Mutia Annur. *Jawa Timur dapat Jatah Vaksin Covid-19 Tertinggi*. 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/02/jawa-timur-dapat-jatah-vaksin-covid-19-terbanyak>

250 juta jiwa.⁷ Selain itu, wujud ketimpangan distribusi vaksinasi di berbagai wilayah Provinsi Jatim pun terlihat jelas melalui data dari vaksin Kemkes yang memuat sejumlah akumulasi dalam bentuk kuantifikasi maupun tingkat persentase pencapaian pelaksanaan vaksinasi.

Data Pencapaian Pelaksanaan Vaksinasi Jawa Timur Per 8 September 2021

Tabel 1

Dosis	Wilayah (Kab/Kota)	Realisasi Vaksinasi dari Target Provinsi
Pertama	Kota Surabaya	2.095.406 atau 94.47%
Pertama	Kota Kediri	205.576 atau 92.5%
Pertama	Kab. Jombang	641.720 atau 62.92%
Pertama	Kota Malang	427.278 atau 65.26%
Pertama	Kab. Nganjuk	235.920 atau 27.31%
Pertama	Kab. Bojonegoro	255.321 atau 24.89%
Pertama	Kab. Malang	436.094 atau 20.98%
Pertama	Kab. Jember	364.677 atau 18.24%
Pertama	Kab. Pasuruan	213.156 atau 17.18%

⁷ Kemenkeu RI. *Indonesia Kedatangan Lagi 5 Juta Dosis Vaksin Sinovac*. 2021. diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-kedatangan-lagi-5-juta-dosis-vaksin-sinovac/>

Tabel 2

Dosis	Wilayah (Kota/Kab)	Realisasi Vaksinasi dari Target Provinsi
Kedua	Kota Surabaya	1.391.496 atau 62.73%
Kedua	Kab. Jombang	421.456 atau 41.32%
Kedua	Kota Malang	253.086 atau 38.66%
Kedua	Kab. Kediri	288.594 atau 22.59%
Kedua	Kab. Nganjuk	118.696 atau 13.74%
Kedua	Kab. Bojonegoro	124.994 atau 12.18%
Kedua	Kab. Malang	222.702 atau 10.72%
Kedua	Kab. Jember	176.820 atau 8.84%
Kedua	Kab. Pasuruan	109.388

Sumber: https://vaksin.kemkes.go.id/#/detail_data

Ketimpangan dalam proses distribusi vaksin, di mana ketercapaian vaksinasi di Kota Surabaya lebih dari 50%, diakibatkan oleh masalah logistik dan pengerahan sumber daya tenaga vaksinator. Di tengah pelaksanaan vaksinasi yang masif, pemerintah menyebutkan bahwa stok vaksinasi masih diberikan pada wilayah Jawa dan Bali.⁸ Distribusi vaksin yang difokuskan pada wilayah Jawa dan Bali difokuskan karena dua pulau ini menjadi episentrum penularan Covid-19. Namun berdasarkan laporan warga yang dikutip dari kanal berita Channel News Asia menyebutkan bahwa ketimpangan cakupan vaksinasi terjadi karena minimnya penyelenggara sentra vaksinasi khususnya di wilayah Malang sebagai salah satu representasi Provinsi Jawa Timur apabila dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta. Infrastruktur pendataan yang tidak memadai dan kurangnya tenaga vaksinator juga menjadi aktor kontribusi minimnya pencapaian vaksin. Kami memandang bahwa timpangnya

⁸ Crawford of Public Policy, ANU College of Asia & The Pacific, *Accurate Data and Inter-Provincial Cooperation are Key to Indonesia's Covid-19 Vaccination Success*, 2021, diakses dari <https://crawford.anu.edu.au/news-events/news/18619/accurate-data-and-inter-provincial-cooperation-are-key-indonesias-covid-19>

pelaksanaan vaksinasi karena minimnya infrastruktur patut untuk diperbaiki, karena setiap warga negara berhak memiliki akses layanan kesehatan yang setara.

Grafik ketimpangan pada proses pendistribusian vaksinasi di Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan secara aktual dalam stratifikasi yang sangat mengkhawatirkan, Timpangnya cakupan vaksin juga diakibatkan oleh pendistribusian vaksin yang tidak merata, dimana vaksin lebih diprioritaskan kepada wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi baik dari segi kompetensi sumber daya manusia serta peluang bisnis dan investasi dengan turut dipengaruhi oleh tingkat produktivitas dan pergerakan nasional maupun internasional melalui sektor industri, seperti Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, dan beberapa daerah lainnya yang kerap menjadi target dari setiap eksekusi kegiatan industrial, dibandingkan dengan wilayah yang berbasis pada sektor pertanian ataupun yang bersifat non-industrial seperti halnya Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Nganjuk, Kab.Bojonegoro, dan sebagainya.⁹ Akibatnya, wilayah-wilayah lainnya yang dinilai kurang potensial dalam paradigma pembangunan dan pengembangan industrial atau bahkan sama sekali tidak memiliki daya tarik khusus terutama di bidang yang berkorelasi dengan hal-hal yang dapat menunjang eskalasi ekonomi baik dari segi mikro maupun makro,¹⁰ cenderung mengalami cakupan vaksin yang rendah, dengan akibat distribusi yang timpang, dan hal ini berpacu dengan transparansi data yang terintegrasi dalam laman informasi mengenai vaksinasi Kementerian Kesehatan.

Narasi dan janji terhadap pemenuhan hak dan keadilan atas nama kemanusiaan seharusnya tanpa polarisasi serta diferensiasi dari aspek tendensial terkait distribusi vaksin yang mementingkan kepentingan kontribusi ekonomi, karena pada esensinya, meskipun transparansi dan asas keterbukaan lainnya yang telah diupayakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun bukan berarti tuntutan keadilan dan pemenuhan atas hak keberlangsungan hidup melalui jaminan perlindungan kesehatan, yaitu penerapan serta aksesibilitas terhadap vaksinasi untuk setiap individu manusia, semata-mata bisa dinilai melalui indikator kenaikan angka saja, sebab hak hidup manusia bukan hanya sebatas data statistik, naraperlindungan yang seharusnya diupayakan oleh pemerintah secara optimum karena sudah menjadi hak bagi seluruh masyarakat sebagai warga negara yang juga bersandar pada konstitusi, sangat tidak layak apabila harus dipertukarkan dengan hitung-hitungan profitabilitas ekonomi.

⁹ Mohtar Rasyid, *Evaluasi Kebijakan Ekonomi Regional Jawa Timur dengan Pendekatan Analisis Klaster Lapangan Usaha dan Industri*, Vol 10 No 2, 2015, diakses dari

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemprov Jatim dalam menanggapi persoalan bansos serta ketidakadilan vaksinasi, diantaranya:

1. PROBLEMA KORUPSI BANSOS SELAMA PERIODISASI PANDEMI

- Menerapkan sistem transformasi digital terhadap proses persiapan dan pelaksanaan distribusi bansos untuk meningkatkan transparansi mengenai jumlah anggaran dana Pemprov Jatim yang turut mencakup anggaran dana masing-masing Pemkot maupun Pemkab yang secara spesifiknya dikhususkan untuk penanganan pandemi dalam hal pengalokasian bansos guna memperjelas aliran dana yang sudah disalurkan maupun didistribusikan maupun yang belum direalisasikan kepada masyarakat di seluruh wilayah kota dan kabupaten Provinsi Jatim, baik dalam bentuk dana tunai ataupun sembako, dan prototype digital ini seyogyanya dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi SST (Secure System Transmission) untuk mencegah terjadinya serangan dan potensi kebocoran data penerima bansos.

- Sistematika digital dapat diwujudkan secara konkret melalui penciptaan sebuah prototype dalam bentuk aplikasi yang telah memadukan sejumlah bentuk kecanggihan teknologi di atas dan difasilitasi oleh ragam fitur yang memuat informasi secara berkala dengan pemanfaatan aplikasi data mining ataupun teknologi sejenisnya untuk menunjang proses transparansi dan pembaharuan data mengenai besaran anggaran provinsi yang dialokasikan untuk penanganan pandemi khususnya bansos, persentase dana yang telah direalisasikan untuk pelaksanaan pembagian bansos serta wilayah mana saja yang sudah memperoleh maupun belum memperoleh anggaran bansos tersebut, dan tentunya fitur pengaduan masyarakat apabila dirasa belum memperoleh bantuan dari pemerintah kota/kabupatennya.

- Dalam peluncuran prototype atau aplikasi distribusi bansos ini, Pemprov Jatim diharapkan dapat menjalin kolaborasi secara komitmen bersama Ombudsman dan OJK guna meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran ataupun pemalsuan transparansi data pada penggunaan anggaran sekaligus mempermudah proses pelacakan apabila dirasa terdapat transaksi yang mencurigakan yang kemungkinan tidak terdeteksi oleh aplikasi.

- Dalam proses pendataan program bansos, pemerintah telah mengintegrasikan data kependudukan (NIK) sebagai basis data penerima manfaat untuk mengurangi data ganda di dalam pendataan di DTSK. Namun masih ditemukan sejumlah masalah, yaitu tidak terdatanya mereka yang seharusnya mendapatkan dan termasuk kriteria. Aplikasi usul 'kemensos perlu dioptimalisasikan.

- Memperkuat pengawasan di tingkat daerah atau lembaga mitra selaku pelaksana pengumpul data penerima manfaat. Ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk

memastikan bahwa pendataan penerima bansos dilakukan secara transparan, melakukan validasi data penerima bansos dengan kunjungan ke lapangan.

- Memperkuat kanal aduan bantuan sosial dengan cara memastikan bahwa kanal aduan dikelola secara aktif oleh pemerintah daerah.

- Mendorong pemberian sanksi kepada pengusul yang tidak mencantumkan nama penerima bansos atau mencantumkan nama fiktif.

2. KETIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN VAKSINASI DI JAWA TIMUR

- Pemprov Jatim membentuk unit khusus pelayanan vaksinasi yang tersebar secara merata di seluruh wilayah provinsi Jatim, baik pada spesifikasi daerah kabupaten maupun kota, dengan disertai pengerahan tenaga medis serta satuan pengamanan

- Sistem pengawasan berkala oleh Kemenkes untuk melihat distribusi vaksin dari pusat ke fasilitas kesehatan, memastikan bahwa vaksin sampai pada tingkat fasyankes. Dashboard distribusi vaksin perlu disertai dengan penambahan fitur yang memuat data kebutuhan masyarakat penerima vaksin untuk mengurangi potensi maupun dampak penyelewengan terhadap pembagian dosis vaksin. Perlu adanya kerja sama kooperatif antara Pemprov Jatim dengan Ombudsman RI untuk mengawasi berbagai kemungkinan penyelundupan dosis vaksin khusus kepada kelompok masyarakat tertentu ataupun potensi penyelundupan ke daerah-daerah tertentu.

- Memperkuat serta memaksimalkan pemfasilitasan dari pengadaan sistem pelaporan untuk setiap kota/kab, sehingga nantinya sistem pelaporan yang akan diberdayakan sebagai wadah aspirasi serta penyampaian keresahan dan laporan warga terkait permasalahan atas aksesibilitas dan ketimpangan vaksinasi, dapat teroptimalkan dengan baik, salah satu wujud konkretnya adalah dengan evaluasi pengelolaan laman CETTAR Jatim termasuk dari segi responsivitas serta penanggulangan permasalahan, agar lebih dapat mengakomodir kebutuhan warga secara keseluruhan.

Kesimpulan

Terdapat pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada selama pandemi ini. Dari sisi penyebaran dan pemerataan bantuan sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 contohnya, kita dapat mengetahui bahwasanya terdapat berbagai macam penyelewengan dan permasalahan sebagai akibat dari minimnya kontrol, transparansi, serta monitoring dari pemerintah terhadap distribusi dari bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat. Selain minimnya pengawasan dan transparansi distribusi bantuan sosial, database masyarakat penerima bantuan sosial yang tidak diperbaharui menjadi celah bagi oknum untuk dapat melakukan korupsi. Hal ini tentu menjadi sebuah catatan bagi pemerintah mengenai kredibilitas data penerima dana bantuan sosial. Jika tidak kunjung ditangani, hal ini dapat berujung kepada berbagai permasalahan besar yang lebih serius : munculnya praktik korupsi dana bantuan sosial, distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan juga kualitas bantuan yang diterima masyarakat tidak sebagaimana mestinya akibat minimnya pengawasan dari pihak terkait.

Selain aspek bantuan sosial yang cenderung tidak transparan dan minim pengawasan, distribusi vaksin yang tidak merata menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Ketimpangan dalam pemerataan distribusi vaksinasi ini, pada Provinsi Jawa Timur sendiri, ditunjukkan oleh ketercapaian pelaksanaan vaksinasi di beberapa kota yang masih di bawah 50 persen pada beberapa kota dan kabupaten padahal jika kita melihat ketercapaian pelaksanaan vaksinasi di Kota Surabaya sebagai kota sentral Jawa Timur sudah lebih dari 60 persen. Per tanggal 8 September 2021 sendiri, Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan vaksinasi dengan realisasi target pencapaian sebesar 10.973.098 atau 34.48% untuk dosis pertama dan sebanyak 6.106.141 atau 19.19% untuk dosis kedua. Hal ini tentu saja masih sangat jauh dari target vaksinasi nasional untuk mencapai target. Ketimpangan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga vaksinator serta kurangnya jumlah serta persebaran sentra vaksinasi yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Kedua masalah utama tersebut tentu harus segera diselesaikan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama, mengingat pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan kesehatan di masa pandemi, sesuai dengan amanat konstitusi.

Daftar Pustaka

- Aminudin, Muhammad. 2021. Curhat Tersangka Korupsi Bansos Pendamping PKH Rp 450 Juta di Malang. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5678619/curhat-tersangka-korupsi-bansos-pandamping-pkh-rp-450-juta-di-malang/1> pada 24 Agustus 2021.
- Cindy Mutia Annur. Jawa Timur dapat Jatah Vaksin Covid-19 Tertinggi. 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/02/jawa-timur-dapat-jatah-vaksin-covid-19-terbanyak>
- Harto, Ambrosius & Agnes Swetta Pandia. 2021. Jatim Perlu Tingkatkan Serapan Bantuan Sosial dan Belanja Tak Terduga. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/07/22/jawa-timur-perlu-tingkatkan-serapan-bantuan-sosial-dan-belanja-tidak-terduga> pada 19 Agustus 2021.
- Kemenkeu RI. Indonesia Kedatangan Lagi 5 Juta Dosis Vaksin Sinovac. 2021. diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-kedatangan-lagi-5-juta-dosis-vaksin-sinovac/>
- Kemkes RI. Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2021. diakses dari vaksin.kemkes.go.id/#/detail_data
- Lavinda. Kasus Positif Covid-19 RI Tambah 12.898 Orang, Terbanyak dari Jatim. 2021. <https://katadata.co.id/lavinda/berita/6122329c46037/kasus-positif-covid-19-ri-tambah-12898-orang-terbanyak-dari-jatim>
- Mohtar Rasyid, Evaluasi Kebijakan Ekonomi Regional Jawa Timur dengan Pendekatan Analisis Klaster Lapangan Usaha dan Industri, Vol 10 No 2, 2015, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/266628-evaluasi-kebijakan-ekonomi-regional-jawa-3b6e2963.pdf>
- Peta Persebaran Covid-19. 2021. diakses dari covid19.go.id
- Wibowo, Eko Ari. 2021. Sejumlah Penyimpangan Bansos yang Terungkap Selama PPKM Level 4. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1491070/sejumlah-penyimpangan-bansos-yang-terungkap-selama-ppkm-level-4> pada 20 Agustus 2021.
-

